

KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN
(Analisis terhadap Sila ke 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Drajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH:

MOH RUM RENUAT
NIM : 201610380211007

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2019

**KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF
PENDIDIKAN**
(Analisis terhadap Sila ke 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia)

Diajukan oleh :

MOH RUM RENUAT
201610380211007

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jumat / 01 November 2019**

Pembimbing Utama



Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Hum

Pembimbing Pendamping



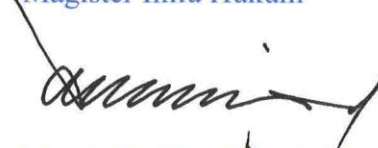
Dr. Sulardi, S.H., M.Si

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhannul In'am, Ph.D

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Mokh. Najih., S.H., M.Hum

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

MOH RUM RENUAT

201610380211007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Jumat / 01 November 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Surya Anoraga., S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. Sulardi, S.H., M.Si

Penguji I : Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum

Penguji II : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Moh Rum Renuat**
NIM : **201610380211007**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya Bahwa :

1. TESIS dengan judul : **KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN (Analisis terhadap Sila ke 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabilah ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang 18 Agustus 2020

takan,



Moh. Rum Renuat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji sukur yang sangat mendalam kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan segala nikmat yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “KEADILAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN (Analisis terhadap Sila ke 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)”.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada

1. Ayahanda Mahmud Renuat (Alm) dan Ibunda Ajaka Wallay, Darwis Renuat, istri tercinta Alifiyanti Urfah Kalilah serta buah hati kami Alfa Naushad Renuat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, do’a, keikhlasan dan kasih sayangnya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
2. Dosen pembimbing dan penguji, Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum, Dr. Sulardi, SH., MSi, dan seluruh jajaran dosen Magister Ilmu Hukum UMM
3. Sahabat-sahabat seperjuangan dan semua pihak yang ikut serta memberikan data-data dalam menyelesaikan tesis ini, Semoga tesis ini memberi manfaat bagi pembacanya, dan mohon maaf yang mendalam jika kiranya masih ada kekhilafan dalam penyusunan tesis ini.

Malang, 18 Agustus 2020

Penulis

ABSTRAK

Keadilan Sosial dalam Perspektif Pendidikan (Analisis Terhadap Sila Ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia)

Moh. Rum Renuat
Nim: 201610380211007
E-mail: rumrenuat@gmail.com

Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum. (NIDN: 0013126302)
Dr. Sulardi, SH., M.Si. (NIDN: 0012076402)

Penelitian ini bertujuan agar pendidikan yang berkeadilan dan merata itu menjadi nafas bagi perkembangan sumber daya manusia yang bermutu dan dapat dirasakan bagi semua anak bangsa tidak memandang status apapun, dari sabang sampai merauke harus merasakan pendidikan yang berlandaskan amanat konstitusi. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) penerapan pendidikan yang berkeadilan social, 2) pentingnya pendidikan yang berkeadilan bagi negara kesatuan republik indonesia (NKRI).

Ini merupakan penelitian normative yang menggunakan Penghampiran perundang-undangan (*Statute Approach*), Penghampiran konseptual (*Conceptual Approach*), dan Penghampiran Analisis (*Analitycal Approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran negara dalam menjamin pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi semua anak bangsa belum tercapai. Meskipun amanat konstitusi telah menjamin, bahkan dalam pembukaan undang-undang jelas mengatakan pendidikan hadir untuk mencerdaskan bangsa. Tapi hal ini terkesan diabaikan oleh negara. Untuk itu perlu adanya usaha bersama negara untuk mendorong terlaksananya pendidikan yang merata dan berkeadilan yang dapat dirasakan bagi semua tanpa terkecuali.

Kata Kunci: Keadilan Sosial, Pendidikan yang Berkeadilan dan Merata

ABSTRACT

Social Justice in the Perspective of Education (An Analysis on the 5th Principle of Pancasila, Social Justice for All Indonesians)

Moh. Rum Renuat
Nim: 201610380211007
E-mail: rumrenuat@gmail.com

Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum. (NIDN: 0013126302)
Dr. Sulardi, SH., M.Si. (NIDN: 0012076402)

This research aims to make a just and equitable education become an underlying factor for the development of quality human resources. Furthermore, hopefully it can be felt by all Indonesians regardless of any status, from Sabang to Merauke. They must experience education based on the constitution mandate. Next, the research focus is as follows: 1) the implementation of social justice in education 2) the importance of just education for the unitary state of Indonesia (NKRI).

This is a normative research which applies statutory approach (statute approach), conceptual approach, and analysis approach (analytical approach). The results show that the role of the State in ensuring a just and equitable education for all Indonesians has not been executed perfectly. Although the mandate of the Constitution has guaranteed, even in the preamble of the law it is clear that education is present to educate the nation but this seems neglected by the State. For this reason, it is necessary to have joint efforts of the State to promote the implementation of equitable and just education that can be felt by all.

Keywords: social justice, just and equitable education

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Abstrak | iii |
| Abstract | iv |
| Daftar Isi..... | v |
| Pendahuluan | 1 |
| A.Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan dan Batasan Masalah | 4 |
| C. Sistematika Penulisan | 5 |
| Tinjauan Pustaka | 6 |
| A.Konsep Keadilan | 6 |
| B. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Modern..... | 7 |
| C. Hakikat Keadilan Sosial | 9 |
| D. Hakikat Pendidikan | 12 |
| Metodologi Penelitian | 13 |
| A. Jenis Penelitian | 13 |
| B.Pendekatan Penelitian..... | 14 |
| C. Tipologi Penelitian..... | 15 |
| D.Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 15 |
| E.Tehnik Pengumpulan Data..... | 15 |
| F.Teknik Analisis Bahan | 16 |
| Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 16 |
| A. Penerapan Pendidikan yang Berkeadilan Sosial..... | 16 |
| B. Pentingnya Pendidikan berkeadilan bagi NKRI..... | 28 |
| C. Pendidikan adalah Hak Asasi Manusia..... | 29 |
| Kesimpulan | 31 |
| Saran..... | 32 |
| Daftar Pustaka | 32 |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendiri bangsa telah menentukan suatu arah bernegara yang tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, namun mengacu hukum yang juga berakar pada tradisi asli bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara paripurna lima prinsip bernegara, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial ke dalam suatu konsep *Pancasila*. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung nilai kehidupan, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia. Dimensi *universalitas* dan *local wisdom* itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia hendak mendirikan negara bangsa berciri modern, tetapi tetap berbasis pada tkeraifan local bangsa Indonesia¹.

Hamid S. Attamimi:

bahwa dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila telah dinyatakan kedudukannya oleh para pendiri negara ini sebagaimana terlihat dalam UUD 1945 dalam penjelasan umum. Disana ditegaskan, bahwa Pancasila adalah Cita Hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis.²

Keadilan sosial dalam negara hukum merupakan unsur utama, mendasar, sekaligus unsur yang paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Kondisi ini karena konsep keadilan dan keadilan sosial, terkandung didalamnya makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, kesejahteraan umum,

¹.Fajlurrahman Jurdi. *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016)

². *Ibid.*,72

serta asas proporsionalitas antar kepentingan individu, kepentingan sosial dan negara.

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia (Kesejahteraan) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan, keterbelakangan pendidikan dalam Indonesia merdeka. Pendidikan adalah bagian dari tanggung jawab negara, maka dari itu hak yang harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Karena jelas Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengatakan bahwa tujuan berdirinya bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan bangsa. Sejalan dengan amanat luhur ini, UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) menyatakan

“Setiap warga negara berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Lebih tegas lagi pada Pasal 31 ayat (1) dinyatakan *“Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.”* tentang hak mendapatkan pendidikan, Undang-Undang telah mengamanatkan kepada negara untuk terselenggaranya sistem pendidikan yang adil merata dan berkeadilan untuk warga bangsa.

Konstitusi kita mewajibkan sekolah bisa menampung semua warga negara, dalam UU no 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional telah menegaskan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta dan diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang tersistem.³

³ Loresta nusantara & Akbar Najamudin. *Mendidik dari Akar Rumput* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019)

Konstitusi dengan jelas menulis bahwa 20 % dari APBN dianggarkan untuk pendidikan. Kesungguhan pemerintah dalam merealisasikan anggaran ini dibuktikan dengan secara serius dalam konsistensinya untuk menjalankan dan mengawasi aliran dana ini. Pengawasan yang sistematis supaya efektif mesti dilakukan agar anggaran itu tidak sekedar mengawang tetapi juga membumi dan menjangkau semua orang sesuai dengan prinsip *Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia*.

Keadilan warga negara sangatlah penting, dalam dasar negara kita saja, Pancasila dalam sila kelima disebutkan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa keadilan tidak memihak pada siapapun yang memiliki uang ataupun kekuasaan begitupun dalam mendapatkan keadilan pendidikan. Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1-5) yang berbunyi (1) Setiap warga negara wajib mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi⁴.

Maka berkaitan dengan keadilan sosial yang harus didapatkan oleh masyarakat Indonesia sepenuhnya namun fakta dilapangan sangat bertentangan

⁴ Deni galus <https://www.indonesiana.id/read/110634/pelaksanaan-pendidikan-yang-adil-dan-merata-di-indonesia#A6G180xcYZUo7Jsr.99> diakses pada tanggal 25 juni 2019.

dengan amanat konstitusi UUD 1945 pasal 31 bahwa perbedaan keadilan atas pendidikan yang didapatkan “mereka” dengan status sosial yang tinggi dibanding dengan mereka yang biasa disebut tidak mampu bahkan meskipun telah berjuang mendapatkan akses pendidikan, tak jarang yang putus sekolah. Menurut hasil survey BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016 di Indonesia terdapat 73% kasus anak putus sekolah. Hal tersebut diakibatkan oleh biaya pendidikan yang semakin mahal. Bahwa semakin mahal biaya pendidikan semakin baik kualitas anak didik. Namun hal ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi tingkat kemiskinan nasional yang tercatat oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada september tahun 2016 mencapai 27,76 juta orang atau 10,7% dari total jumlah penduduk Indonesia.

Selain kemiskinan, keadilan dalam mendapatkan pendidikan pun masih dipertanyakan dalam hal yang lain. sementara siswa didaerah pelosok juga perlunya mendapatkan pengajaran dari guru yang profesional. Melangkah lebih jauh kebelakang lagi, wacana tersebut selaras dengan ketersediaan sarana dan prasaaran yang terdapat di sekolah-sekolah daerah pelosok sangat berbeda dengan yang dikota mulai dari media pembelajaran, buku, kondisi kelas serta sarana pendukuung pembelajaran lainnya.

Dalam ratiifikasi kovenan ekosob misalnya. Negara telah berkomitmen untuk hadir dalam memenuhi hak-hak warga Negara yang ditandai dengan terbitnya UU no. 11 tahun 2005 tentang pengesahan *Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) Misalnya poin (10) hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma dan (11) hak untuk berperan seerta dalam

kehidupan budaya, menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.

Oleh arena itu perwujudan keadilan atas pendidikan dalam negara hukum Indonesia merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan, karena dalam praktiknya secara politis seringkali diaktualisasikan dalam bentuk dominasi kekuatan- kekuatan yang saling bertaarung, dan dari uraian diatas telah jelas negara telah terjadi salah urus, maka keadilan atas pendidikan itu nyaris menjadi Mitos. Maka dari itu, dalam penulisan tesis ini penulis fokus membahas tentang **“Keadilan Sosial dalam Perspektif Pendidikan”** (Analisis Terhadap Sila ke 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, peneliti mengemukakan beberapa permasalahan yang menjadi penting untuk dilakukan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pendidikan yang berkeadilan sosial?
2. Pentingnya Pendidikan berkeadilan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

C. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan tesis ini lebih terarah, maka penulis membagi kedalam beberapa bab, yaitu:

Bab I : Bab I merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan dan batasan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, originalitas penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada Bab II , peneliti membahas mengenai tinjauan pustaka, diantaranya membahas tentang konsep Keadilan, Hakekat keadilan sosial, Hakikat Pendidikan, Pengertian dan Fungsi Pendidikan, teori-teori pendidikan.

Bab III: Penulis membahas tentang metode penelitian, yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, tiipologi penelitian, jenis dan sumber bahan-bahan pendidkan, teknik pengumpulan bahan pendidkan dan, dan teknik analisis bahan Pendidikan.

Bab IV: Pada Bab IV ini, penulis mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan diantaranya bagaimana penerapan pendidikan yang berkeadilan sosial, konsep dan landasan legal pendidikan, penerapan pendidikan dalam konteks hak ekosob, pendidikan yang berkeadilan dan merata, konsep dan landasan legal keadilan, menuju perundang-undangan pendidikan yang berkeadilan, Pentingnya Pendidikan berkeadilan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bab V : Bab ini merupakan bab penutup yang menguraiikan beberapa kesimpulan dan saran/ rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

TINJUAN PUSTAKA

A. Konsep Keadilan

Keadilan masih imajinatif merupakan sesuatu yang dibalang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang pasti mendambakan keadilan. Di Ilmu hukum keadilan maish merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti keadilan itu tidak dapat diartikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus

ditelaah dari sudut pandang teoritik dan filosof. Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap dan tingkah manusia terhadap sesamanya dan lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Pertama obyek materi yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kemestaan, baik yang konkrit dan alamiah maupun yang abstrak dan non material seperti jiwa dan rohani termasuk juga nilai abstrak seperti nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materi, yakni mengerti sedalam untuk menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek materi⁵.

B. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Modern

Konsep keadilan pada jaman modern banyak sekali diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberal aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral termasuk penggunaan pikiran akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberal sangat menegaskan kemerdekaan individu. Istilah liberal erat kaitannya dengan kebebasan, titik daripada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal⁶.

⁵ Bahder Johan Nasution. Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern. <http://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106> diakses tanggal 19 Oktober 2018

⁶ Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 63.

Teori-Teori Keadilan

Inspirasi tertua dalam sejarah untuk merumuskan 'keadilan' tampaknya konfusius telah lama mengemukakan gagasan mengenai 'yii' yang berarti keadilan, ada dua pemahaman dasar keadilan menurut konfusius. Pertama "Apa yang orang tidak mau terjadi pada dirinya, jangan orang itu melakukan pada orang lain; apa yang orang inginkan bagi dirinya, itu juga yang dia harus berikan pada orang lain, kemudian dari pada itu yang kedua menurut Konfusius adalah: "Balaslah yang jahat dengan keadilan, dan balaslah kebajikan dengan kebaikan", dari konsep ini lah kemudian Immanuel Kant (Prusia 1724-1804) membentuk maxim yang dikenal sebagai 'kategori imperative'⁷.

Satjipto Rahardjo (1930-2010) kemudian dalam teorinya yang dirumuskan dari 'Seraat Sasaangka Jati' adil adalah tegak, tidak berat sebelah, oleh karena itu juga bisa diberi arti lurus atau benar, itu berarti nyata, dan nyata itu kejujuran dan akan lebih kompleks dari apa yang saya sebut 'keadilan' itu sebagai proses *Take and Give* yang seimbang. Serat Sasangka Jati bukan hanya soal mengukur berat sebelah atau tidak itu yang kemudian menghasilkan keadilan, melainkan pada akhirnya sikap jujur yang Nota Bene menyentuh dimensi hati nurani individu masing-masing⁸

Kemudian **John Rawls** pun menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran⁹.

⁷ Budiono Kusumahamidjojo. Teori Hukum, dilema antara hukum dan kekuasaan (Bandung: Yrama Widya, 2016)

⁸ *Ibid.* Budiono Kusumahamidjojo:274-275

⁹ Fadhila. *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan*. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=95011&val=1230>, diakses pada tanggal 27 Oktober, jam 19.30.

John Rawls hidup pada awal abad 21 lebih. melihat kepentingan utama keadilan merupakan (1) jaminan stabilitas kehidupan manusia, dan (2) dapat menyeimbangkan antara kehidupan individu dan kehidupan bersama.

Jhon Rawls percaya bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang sesungguhnya dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan dapat terpenuhi. Struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

1. Dapat menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak
2. Dapat melakukan koreksi yang jujur dan atas ketidakadilan sosial.

Jhon Rawls berpendapat yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial yang terjadi sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi-situasi masyarakat yang taat atas prinsip hukum itu. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan masyarakat pada posisi asli kearifannya atau entitasnya (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar sesama anggota masyarakat secara sederajat atau perlu sama¹⁰.

C. Hakikat Keadilan Sosial

Sebagaimana diketahui secara umum dalam kajian sosial-politik, banyak digunakan istilah *keadilan sosial*, dan kita lebih banyak menggunakannya daripada keadilan umum. Ahli ekonomi Jerman, H. Pesch (1854-1926), berpendapat, keadilan sosial tak lain ialah istilah umum untuk keadilan umum dan keadilan distributive. Kemudian banyak orang menyetujuinya. Tetapi kemudian

¹⁰ *Ibid*

sementara orang berpendapat, keadilan sosial merupakan bentuk keempat dan berlainan dari keadilan, yang sejauh itu belum lengkap. Menurut pendapat ini keadilan mempunyai empat bentuk yaitu legal, komutatif, distributif, dan sosial. Akan tetapi aliran ini jarang menyebutkan keadilan umum (Welthy 1990: 317). Dalam rumusan sila ke lima Pancasila ditentukan dengan rumusan “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. dimana dijelaskan di depan bahwa hakikat keadilan sosial sebagaimana terumuskan dalam sila ke lima tersebut, merupakan suatu tujuan Negara Indonesia. Sebagai filsafat Negara dengan sila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

a) Keadilan distributif.

Aristoteles keadilan distributif adalah layaknya seseorang dalam tindakan manusia (*Fainess in human action*). layaknya artinya titik tengah diantara kedua ujung tersebut menyangkut dua orang atau dua benda sehinggah sekurang-kurangnya terdapat empat hal. Bila perlu kedua orang tersebut terdapat kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing layaknya memiliki benda yang sama. Namun distribusi tersebut terwujud dalam suatu perimbangan (Propositional)¹¹.

b) Hubungan Keadilan yang Bersifat Segi Tiga

Inti yang terkandung dalam sila ‘*keadilan*’, berarti mengandung pengertian kesamaan dan hakikat dengan hakikat adil. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

¹¹ Kaelan. M.S, Negara *Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. (Yogyakarta: Paradigma, 2013)

Maka dalam dalam kehidupan bersama (masyarakat), bangsa dan Negara terdapat tiga macam hubungan keadilan (*hubungan keadilan segi-tiga*) yaitu:

- I. ***Segi pertama*** yaitu masyarakat, bangsa dan Negara adalah pihak sebagai pihak para pihak yang wajib memenuhi keadilan bagi warganya. Hubungan keadilan segi pertama ini disebut keadilan membagikan (*keadilan distributif*).
- II. ***Segi kedua*** yaitu warga negara sebagai parapihak yang wajib memenuhi keadilan terhadap masyarakat termasuk negaranya. Keterkaitan antar keadilan segi kedua ini disebut sebagai *keadilan bertaat*, ini dapat dipahami karna hakekatnya terwujudnya suatu masyarakat sebagai akibat kehendak bersama dari pada warga bangsa. Karena ada kesempatan dan kehendak bersama untuk mewujudkan suatu masyarakat bangsa yang patuh dan taat atas peraturan.
- III. ***Segi ketiga*** adalah berupa hubungan keadilan yang termanifestasikan antara sesama warga, bangsa, termasuk negara, dalam artian terdapat wajib tiimbal balik untuk saling memenuhi keadilan diantara sesama warga. Hubungan keadilan yang bersifat timbal balik diantara sesama warga ini disebut '*keadilan koomutatif*'. Didalam hidup bersama harus terwujud *keadilan koomutatif* dimana memberikan sesama warga bangsa.

Maka dari itu dalam setiap komponen dalam penyelenggaraan. maka negara perlu merealisasikan keadilan yang senantiasa akan terwujud ketiga segi keadilan tersebut, yang realisasinya hubungan keadilan antara Negara terhadap

warga Negara (*keadilan distributif*), sesama warga Negara atas Negara (*keadilan bertaat*), dan antara sesama warga Negara (*keadilan komutatif*).

Prinsip keadilan Pancasila mendapat perhatian serius dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip keadilan juga dituangkan dalam pasal-pasal dan dokumentasi yang terkait. Komitmen keadilan itu tampak nyata, baik dalam pasal-pasal yang menyangkut keuangan Negara yang menekankan kedaulatan rakyat maupun pasal-pasal yang menyangkut pengelolaan perekonomian yang menekankan pemenuhan hak warga serta jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial¹².

D. Hakikat Pendidikan

- Mengenalkan peraturan-peraturan dan menanamkan disiplin kepada anak.
- Mengenalkan anak pada dunia sekitarnya.
- Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik.
- Mengembangkan kemampuan berkomunikasi anak dan bersosialisasi.
- Mengembangkan ketrampilan, kreativitas anak, dan kemampuan yang dimiliki anak.

a. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya

Sebagai proses transformasi budaya bangsa, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lainnya. Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi ke generasi. Ada 3 bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggungjawab dan lain-lain, yang kurang cocok diperbaiki misalnya tata cara perkawinan, dan tidak cocok diganti misalnya

¹² *Ibid hal 400-406*

pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal.

➤ **Definisi pendidikan menurut pakar dibidangnya antara lain:**

- . Prof. H. Mahmud Yunus

Yang dimaksud pendidikan ialah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak-anak Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya.

- Prof. Herman H. Horn

Beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk sesame k yang telah berkembang secara fisik dan mental yang bebas dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan kemauan dari manusia¹³

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian Pendidikan dan hukum normatif. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan

¹³ Mukhrizal Arif, dkk. *Pendidikan pos modernism, telaah kritis pemikiran tokoh pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)

pendidikan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.¹⁴ Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma pendidikan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kemudian penelitian normatif yaitu penelitian terhadap azas-azas dan norma-norma pendidikan, inventarisasi bahan pendidikan positif, dan sistematika pendidikan, hukum.

Berdasarkan hal tersebut, objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah UU dari Pasal 28C dan UUD 1945 pasal 31, UU Sisdiknas No 20 tahun 2003

B. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*).¹⁵ Penulis menggunakan pendekatan ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu yang sedang dicari jawabannya.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang peneliti lakukan dengan menelaah/menganalisis Pasal UUD 1945 dari Pasal 28C, Pasal 31, UU No 20 tahun 2003.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998), hlm 10.

¹⁵ Ada tujuh macam pendekatan dalam penelitian hukum, sebagaimana yang dikemukakan Johnny Ibrahim: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*); (3) Pendekatan analisis (*analytical approach*); (4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (5) Pendekatan historis (*historical approach*); (6) Pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan (7) Pendekatan kasus (*case approach*). Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 306.

Kemudian dalam pendekatan konseptual (*conceptual approach*) peneliti akan mempelajari beberapa pendapat hasil penelitian kajian hukum yang berkaitan dengan keadilan social dan doktrin-doktrin yang berkaitan pembahasan dalam penelitian,

C. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian adalah tipologi penelitian eksploratif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui, dalam hal ini peneliti akan mencari keterangan, penjelasan mengenai urgensi keadilan sosial terhadap pendidikan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian tesis ini, peneliti akan menggunakan beberapa sumber hukum yang berkaitan dengan pembahasan:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain, UUD NRI Tahun 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berupa buku-buku yang mengkaji tentang hukum serta yang berkaitan dengan pembahasan, karya tulis ilmiah dibidang hukum dan pendidikan, jurnal dalam bidang kajian pendidikan beberapa pendapat para ahli hukum.

E. Teknik Pengumpulan Bahan

Adapun cara pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari bahan kepustakaan yang dilanjutkan membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literature yang merupakan sumber hukum

primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier yang berkaitan dengan pembahasan, peraturan perundang-undangan, artikel atau jurnal, makalah seminar atau lokakarya, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Bahan

Dalam menganalisis bahan hukum, sebagai upaya menjawab permasalahan yang diajukan pada latar belakang dan dalam rumusan masalah, peneliti menggunakan analisis konten. Melalui analisis konten diteliti kandungan dari pasal tersebut melalui penafsiran gramatikal sehingga akan memberikan jawaban permasalahan yang sedang diteliti. Dari hasil analisis pasal tersebut, peneliti akan mengkonstruksikan konsep berkaitan dengan keadilan Sosial, Keadilan Komutatif, Keadilan Distributif, termasuk juga keadilan pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pendidikan yang Berkeadilan Sosial

Inti dari tujuan pendirian bangsa Indonesia merupakan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana manifes pembukaan UUD 1945. Artinya bahwa pendidikan adalah usaha untuk mencerdaskan dan sesuatu yang sangat penting, fundamental dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama. UUD 45 Pasal 31 mengamanatkan bahwa. (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Pemerintah menyelenggarakan dan mengusahakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) Pemerintah berusaha memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia

Maka semangat dari amanat konstitusi adalah bagaimana pendidikan yang merata, berkeadilan dan mampu dijangkau oleh masyarakat bangsa. Maka pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan masyarakat harus mengusahakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara serius mengawal pembangunan pendidikan dari masa ke masa. belum banyak hasil yang dapat dicapai dan dirasakan atas pendidikan, maka secara obyektif banyak sekali hal pula yang perlu terus diupayakan demi membangun pendidikan yang lebih efektif dan merata, sehingga mampu memberikan kemampuan dan bekal bagi setiap insane bangsa Indonesia.

Dalam pembukaan undang-undang no. 20 tahun 2003 menegaskan:

“Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan”

Karna kenyataannya layanan pendidikan yang bermutu, berkeadilan itu, terutama jalur pendidikan formal belum dapat diakses oleh semua warga negara terutama bagi kelompok masyarakat miskin, aspek fisik, mental, intelektual, geografis, ekonomis, kultural, maupun persoalan gender. Atas dasar itulah melalui

semangat reformasi, maka amanat UUSPN No.20 tahun 2003 telah menegaskan melalui salah satu pasalnya tentang prinsip pendidikan bahwa pendidikan wajib diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keagamaan, nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa Indonesia.

Prinsipnya bahwa pendidikan seyogyanya dijadikan acuan dalam memberikan layanan pendidikan baik lokal maupun nasional, ternyata pada prakteknya tidak sedikit pemerintah dan masyarakat belum berhasil mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Kiranya terjadi banyak faktor yang belum mendukung sepenuhnya dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, terlebih di era sesudah reformasi ini. Maka itu dapat diidentifikasi dan dicarikan solusinya, sehingga pendidikan bagi semua dapat diwujudkan, dan dapat memberikan kepuasan bagi semua anak bangsa.

Menjamin pendidikan terbuka merupakan kewajiban, dan sekaligus sebagai kebutuhan kita bersama sebagai sebuah bangsa yang besar, baik pemerintah maupun warga atau masyarakatnya, sebenarnya negara harus mengusahakan jaminan pendidikan yang bermutu bagi semua anak bangsa. Negara menegaskan komitmennya terutama yang ditetapkan dalam berbagai sumber hukum misalnya dalam pembukaan UUD 45 dimana telah menegaskan bahwa negara harus hadir untuk mencerdaskan bangsa, artinya setiap masyarakat bangsa memiliki hak yang sama atas kesempatan dalam pendidikan berkeadilan.

Maka menurut penulis yang sangat penting untuk diupayakan adalah adanya kebijakan affirmative action yang terus mendorong terciptanya masyarakat inklusif yang sekaligus perlu dikembangkan pendidikan inklusif, sehingga

terbukanya pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat dengan segala keterbatasannya, baik segi fisik, mental, sosial, emosiional, ekonomi, untuk memiliki kesamaan dalam mengakses layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan, sesuai dengan misi strategis mendikbud tahun 2020-2024

- I. Mengembangkan potensi anak secara harmonis menjadi insane khamil berkarakter melalui keseimbangan olah hati (etik), olah pikir (literasi), olah rasa (estetik), dan olah raga (kineestetik) baik yang dilakukan melalui satuan pendidikan maupun lewat pendidikan keluarga
 - II. Memastikan hasil pendidikan dan kebudayaan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dan mendukung sektor-sektor unggulan, termasuk industry kreatif berbasis seni budaya dan olahraga.
 - III. Membangun komitmen disemua tingkatan pemerintah dan masyarakat demi membangun pendidikan dan kebudayaan, dalam pengelolaan dan pembiayaan¹⁶
- a) **Mutu Layanan Pendidikan belum Merata dan belum Memihak pada Penduduk Miskin**

Kenyataan pencapaian pendidikan di Indonesia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi saat ini masih berada dalam kotegori di bawah standar umum (*Kompas*, 16/02/2018). Beranjak dari situasi ini, pembenahan kualitas pendidikan menjadi agenda mendesak bagi pemangku kepentingan dalam mempersiapkan “generasi emas” di tahun-tahun mendatang.

¹⁶ Disampaikan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) pada seminar pendidikan di Universitas negeri Malang, tgl 2 september 2019.

Kalau kemudian kita melihat data *Global Humans Capital Report*, yang diterbitkan *World Economic Forum* tahun 2017, Peringkat Indonesia dalam persoalan pendidikan kita menempati peringkat 65 dari 130 negara. Posisi yang tertinggal jauh dari negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*), kita lihat misalnya Singapura (12), Malaysia (33), Thailand (40), dan Filipina (50). Dan laporan Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) sangat terlihat bahwa pendidikan kita masih tertinggal dari negara-negara tetangga yang sebenarnya kalau kita tinjau sejarah mereka belajar dari bangsa kita. kenapa demikian, menurut saya telah terjadi disparitas atas pendidikan itu sendiri, minim hadirnya keadilan atas pendidikan, atas ekonomi, atas sarana-prasarana, utamanya di daerah-daerah 3T¹⁷.

Kita ketahui bersama bahwa menurut sumber dari mendikbud postur anggaran pendidikan tahun 2019 adalah 492, 5T, pos terbesar dianggar untuk daerah-daerah 308,38T (62,62%), pos kemenag 51,9T (10,53%), kemenristekdikti 40,2T (8,14%). Kemendikbud 35,99T (7,31%), kementerian lain 25,63T (5,2%), dppn 20,99T (4,26%), ba bun 9,36T (1,90%), maka selayaknya daerah-daerah harusnya mampu mengatasi kesenjangan atas pendidikan tersebut, karna daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing lewat desentralisasi demi terselenggaranya pendidikan yang merata dan berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi negara, namun apabila dengan anggaran dan sumberdaya manusia yang ada tapi tidak dikelola dengan selayaknya maka kita

¹⁷ Opcit. Mendidik dari akar rumput, hal 156

akan terus berada dalam kubangan kebodohan yang terus disengaja adanya oleh negara dan pemerintahannya¹⁸.

Misalnya, Andrew Rosser (2018), Professor Universitas Melbourne, Australia, yang hasil studinya berjudul “*Beyond access: Making Indonesia’s education system work*” mengemukakan kenapa Indonesia masih gagal dalam mengembangkan sebuah aturan pendidikan yang mampu menghasilkan tingkat belajar berkualitas, berkeadilan. Hasil kajian Professor Andrew menunjukkan bahwa alasan permasalahan pendidikan di Indonesia begitu kompleks. Misalnya, ada yang dikarenakan ketidakcukupan anggaran (*inadequate funding*), kekurangan sumber daya manusia (*human resource deficits*), struktur keinginan terus berlawanan (*perverse incentive structure*), dan manajemen yang kurang baik (*poor management*). Selain itu juga, dominasi politik birokrasi, dan kumpulan kaum elit dari Orde Baru dan setelah Orde baru yang terus mengkooptasi, termasuk dalam institusi pendidikan, dimana pendidikan berbiaya tinggi cenderung tak terhindarkan dan menjadi momok bagi orang miskin

Maka pemerintah perlu perancangan untuk mengimplementasikan satu sistem program pendidikan bermutu dan relevan, dan tidak memberatkan. Orientasi pendidikan untuk mengarahkan kepada pembentukan manusia cerdas dan bisa hidup terbuka, well-adaptive, maka perlu kiranya diikuti dengan rancangan kurikulum yang baik dan dibangun berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik Indonesia, dimana tuntutan masyarakat kita, dan perkembangan media teknologi di era ini. Kendati demikian kurikulum yang telah dirumuskan dengan baik dan komprehensif itu, namun pada tataran

¹⁸ Ibid

implementasi perlu didukung dengan pemikiran yang kreatif SDM yang mumpuni, sehingga kehadiran kurikulum masih memiliki relevansi dengan pendidikan nasional.

Maka menurut penulis Perlu adanya percepatan wajib belajar 12 tahun, Gerakan kembali ke sekolah, Kesiapan 1 tahun pra-sekolah, Pembelajaran ketrampilan Abad-21 (*higher-order thinking skills*), STEM (*science, technology, engineering mathematics*), life skills, dan literasi, Pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran, Profesionalisme, Kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru, Pengembangan anak usia dini secara holistic dan integratif, Integrasi layanan pendidikan dan kesehatan lintas sector, Afiriasi pendidikan untuk Papua dan daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, Pentingnya pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas¹⁹.

b) Sarana dan fasilitas pendidikan

Dari data kemendikbud bahwa pada tahun 2014-2018 pemerintah telah membangun 4.299 sekolah baru rinciannya adalah. Paud 2.671 unit, SD 82 unit, SMA 396 unit PKLK 103 unit, SMK 377 unit, SMP 620, SLB 50 unit. Ini artinya bahwa pemerintah memberikan perhatian lebih atas sarana prasarana. Amanat UU Republik Indonesia No 20 tentang SPN tahun 2003, Pasal 5 Ayat 1

“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan berkualitas sangat ditentukan oleh fasilitas, sarana dan prasarana penunjang namun fakta dilapangan masih ada siswa dikota-kota besar maupun daerah-daerah dipelosok negri yang

¹⁹Madjid, Nurcholish, (1992), Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang sistem Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemooederenan, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

tidak memiliki sekolah yang memadai. dari sumber liputan 6 SCTV siaran tanggal 16 agustus bahwa ternyata di kota bogor masih ada para siswa SD yang sekolah hanya beratapkan terpal dan berlantaikan tanah ini menjelaskan bahwa sarana prasarana belum memenuhi baik itu di kota-kota besar maupun daerah-daerah 3T. Misalnya di desa ujir kabupaten kepulauan aru Maluku, kebetulan itu desa saya. disana bangunan sekolah dasar dibangun menggunakan kayu seadanya oleh masyarakat sekitar, terlalu lamanya menunggu bantuan dari pemerintah karna kalau tidak putra-putrinya tidak akan mengenyam pendidikan dasar²⁰.

Maka menurut peneliti pemerintah harus mengadakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah, perlu adanya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan yang mendesak bangsa ini²¹.

c) **Pemberlakuan Sistem Zonasi**

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk memajukan dan mengembangkan kehidupan bangsa, sesuai dengan tujuan pendidikan bangsa. Komitmen bangsa Indonesia untuk memperjuangkan, memajukan pendidikan tertuang pada tujuan negara (Alinea IV pembukaan UUD 1945) yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa harus didukung, dan ditinjau untuk mencapai harapan serta tujuan pendidikan nasional yang berkeadilan. Salah satu kebijakan pemerintah yang perlu ditinjau dan dibahas adalah persoalan sistem zonasi pendidikan. Landasan hukum zonasi pendidikan yaitu keadilan sosial bagi seluruh

²⁰ *Opcit*

²¹ [Staff.uny.ac.id/sites/default/files/prof-dr-rochmad-wahab-mpd-ma/implementasi-prinsip-keadilan-sosial-bidang-pendidikan-di-indonesia-pasca-reformas.pdf](http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/prof-dr-rochmad-wahab-mpd-ma/implementasi-prinsip-keadilan-sosial-bidang-pendidikan-di-indonesia-pasca-reformas.pdf), diakses pada tgl 2 juli

rakyat Indonesia (Sila ke-5 Pancasila), Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Pasal 31 ayat 1 UUD 1945), Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Th. 2003 tentang SPN).

Kemendikbud bersandar pada prinsip-prinsip pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan, artinya anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkeadilan, bermutu. Sistem zonasi dibuat untuk meratakan sekolah negeri sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan²²..

Dan pemberlakuan sistem zonasi dalam PPDB 2018/2019 lewat permendikbud No 14 tahun 2018 itu akhirnya banyak menimbulkan pro-kontra antara lain: *Pertama*, jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB. Pihak yang kontra menilai bahwa mengutamakan jarak sebagai penentu utama PPDB masih sulit dilaksanakan, melihat jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah masih belum seimbang dan merata. Persoalannya, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta anak didik

Maka menurut penulis. *Pertama* dalam system zonasi pendidikan ini perlu upaya pemerintah secara serius untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang merata di setiap sekolah. Selain itu, mengingat kondisi setiap daerah yang berbeda, maka penerapan sistem zonasi perlu disesuaikan dengan kondisi

²² <http://www.neraca.co.id/article/118262/sistem-zonasi-ppdb-melanggar-konstitusi>, diakses pada tgl 25 september 2019.

geografis setiap daerah dengan tetap berpegang pada prinsip perbaikan, mendekatkan jarak tempat peserta didik dengan sekolah.

Kedua sebelum mengeluarkan kebijakan, adanya observasi mendalam, pemerintah perlu persiapan yang tepat juga. Perlu adanya sosialisasi yang massif secara terus menerus maka dalam waktu yang panjang sebelum diterapkan, agar pemerintah daerah dan masyarakat dapat mengetahui dan memahami kebijakan tersebut secara komprehensif dan mendalam. Sistem zonasi bukan hanya tentang jarak dan tempat, namun lebih jauh lagi untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia secara merata dan berkeadilan agar bisa teratasi²³.

d) Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Pendidikan layaknya harus benar- benar bisa diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pendidikan bagi setiap anak bangsa adalah wajib bagi negara memfasilitasnya, Jangan memberi pengkotak- kotakan antara mereka miskin dan kaya. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak melakukan diskriminasi, artinya mereka semua yang adalah anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi semua sesuai amanat konstitusi. Amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Pasal 4 ayat 1, bahwa

“Pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”,

Kemudian Pasal 5 ayat 1, bahwa

”Setiap warga (anak bangsa) mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”.

²³ Ibid.

Jelas bahwa amanat konstitusi mengharuskan negara untuk menghadirkan dan memfasilitasi pendidikan yang demokratis, berkeadilan sekaligus terjamin mutu dan kualitas pendidikan.

Namun adanya uang kuliah tunggal (UKT) mulai diberlakukan pada mahasiswa baru tahun akademik 2013-2014 diseluruh perguruan tinggi negeri kebijakan ini merujuk peraturan mendikbud No 55 tahun 2013 tentang biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) pada perguruan tinggi negeri dilingkungan PTN. Ini jelas telah mengkonfirmasi adanya disparitas antara yang miskin dan kaya maka ini sangat jauh dari rasa keadilan atas pendidikan. Yang dimana jelas amanat konstitusi mengamanatkan adanya pendidikan yang demokratis dan berkeadilan, mengharuskan untuk dapat menampung semua kalangan, baik sosial maupun ekonomi. tetapi fakta dilapangan bertentangan dengan amanat konstitusi misalnya dengan adanya peraturan mendikbud dan menristikdikti tersebut.

Fakta dilapangan misalnya, sebagian mahasiswa negeri angkatan 2013 terkena dampak penetapan UKT. Merujuk pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi,

“Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya”

Namun kenyataanya dan masih banyak mahasiswa yang secara ekonomi masuk dalam golongan kurang mampu namun dikenai UKT On Top atau tarif tertinggi, misalnya mahasiswa-mahasiswi Unpad angkatan 2013 mengeluh dan merasa sangat berat bagi mereka untuk kedepannya dengan adanya UKT. Berdasarkan data Forum Peduli Pendidikan, tahun 2013, khususnya di Unand menim-

bulkan 170 korban yang tidak ditempatkan pada level yang tepat, satu orang mahasiswa mencicil uang kuliahnya, dua mahasiswa berhenti studi sementara bahkan berhenti tanpa pemberitahuan karena tidak sanggup membayar uang kuliah tunggal itu.

Termasuk mahasiswa universitas brawijaya (UB) dan universitas gajah mada (UGM), universitas negeri Jakarta (UNJ) persoalannya sama yaitu UKT yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua, beda halnya bagi mereka yang mampu secara ekonomi, maka saya kira negara telah membuat jurang pemisah yang sangat terlihat antara yang miskin dan kaya, maka regulasi pendidikan yang diharapkan hadir untuk memenuhi rasa keadilan atas pendidikan justru diabaikan oleh negara sendiri²⁴.

Maka menurut penulis, *Pertama* penerapan tarif uang kuliah tunggal (UKT) sebaiknya dilaksanakan secara berkeadilan dengan mempertimbangkan kapasitas atau kemampuan mahasiswa yang disesuaikan dengan pendapatan orang tua mahasiswa guna mencapai maksud dari amanat konstitusi, *Kedua* pemerintah juga harus memastikan adanya mekanisme subsidi silang (*cross subsidy*) dan memperbesar kuota beasiswa terutama bidik misi dengan tepat sasaran dan tepat guna, bila perlu diterapkannya sistem pembayaran secara perlahan bagi mereka yang secara ekonomi lemah. Untuk menghadirkan akses pendidikan berkualitas dan bermutu, dan warga bangsa berhak mendapat pemenuhan hak yang sama dari layanan pendidikan bermutu. Lebih jelasnya bahwa setiap warga negara berhak

²⁴ <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/51206/mahasiswa-minta-penerapan-ukt-lebih-akurat>, diakses tgl 27 september 2019

mendapatkan jaminan hukum dalam mengakses pendidikan yang merata dan berkeadilan secara nasional.

Dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk mengusahakan terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu maka perlu didukung dengan berbagai komponen, fasilitas SDM yang memenuhi standar nasional, baik itu terkait dengan sarana pendidikan, proses pendidikan yang progres, kompetensi lulusan-lulusan terbaik, termasuk tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen pendidikan bermutu, pendanaan pendidikan yang besar, maupun standar penilaian pendidikan. Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang mampu memenuhi standar nasional²⁵.

B. Pentingnya Pendidikan berkeadilan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Kita menyadari negara maju begitu memprioritaskan pendidikan bermutu, berkeadilan. Maka untuk menghadirkan pendidikan yang bermutu perlu juga adanya akses yang terbuka dan transparan dan itu harus dihadirkan pemerintah terhadap warganya, maka pendidikan gratis merupakan jalan terbaik yang harus diambil oleh negara bagi masyarakatnya, dengan diberlakukannya pendidikan gratis sesuai amanat Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 berbunyi : 1) Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan 2) wajib belajar merupakan tanggung jawab negara dengan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

²⁵Emmanuel Sujatmoko <https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendidikan.pdf>, diakses pada tanggal 2 juli 2019

Undang-undang No. 11 tahun 2009, hakekat kesejahteraan sosial adalah menjamin setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendidikan yang layak adalah salah satu kebutuhan bagi warga negara. Namun kebijakan-kebijakan pemerintah ini masih menjumpai banyak kendala di daerah-daerah yang masih minim pengawasan dari pihak-pihak terkait, karena nyatanya masih banyak terjadi penyelewengan terhadap anggaran yang diperuntukan bagi siswa yang membutuhkan²⁶

Maka menurut peneliti. *Pertama* pendidikan gratis yang dicanangkan dan menjadi amanat konstitusi itu perlu formulasi yang tepat agar tepat sasaran sesuai yang membutuhkan, karena masih banyak kejadian terjadi kesalahan dalam pengelolaan sehingga antara yang kaya dan miskin sama-sama merasakan pendidikan gratis, padahal tidak semestinya itu terjadi, pendidikan gratis layaknya diperuntukan bagi mereka yang membutuhkan.

C. Pendidikan adalah Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan sebuah negara hukum, dimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum yang bertujuan untuk menghadirkan tatanan sosial yang berkeadilan dengan menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Untuk mewujudkan Negara hukum yang utuh, Maka sistem hukum harus dibangun

²⁶Muhammad.<https://www.kompasiana.com/muhammadibnu5874/5b54d8ddd1962e32b47d3629/pendidikan-dan-hak-asasi-manusia?page=all>, diakses tgl 23 september 2019

berlandaskan (*laawmarking*) dan ditegakan (*laawenforcing*) demi keadilan.

Konsep Negara hukum mencakup empat elemen penting²⁷, yaitu :

- Hak asasi manusia;
- Pemisahan atau pembagian kekuasaan demi menjamin hak-hak manusia itu;
- Pemerintah berlandaskan pada peraturan-peraturan; dan
- Peradilan administrasi dan dalam perselisihan.²⁸

Maka menurut peneliti hak pendidikan hadir untuk mengupayakan, mengembangkan potensi-potensi manusiawi baik dalam bentuk potensi fisik, potensi cipta, potensi rasa, potensi karsanya. Investasi keterampilan manusia (*Human Skill Investment*), merupakan menyangkut hal penyiapan keterampilan anak bangsa yang diwujudkan dengan diberikannya akses pendidikan lewat pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dan juga memberikan peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri.

- Dalam penjelasan konstitusi atau lazim disebut UUD NRI 1945, yang diuraikan dalam Pasal 28 C ayat (1), yang menyatakan bahwa

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, (2003), Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

²⁸ Muhammad. <https://www.kompasiana.com/muhammadibnu5874/5b54d8ddd1962e32b47d3629/pendidikan-dan-hak-asasi-manusia?page=all>, diakses tgl 4 juli 2019

- Maka dari itu esensinya sebuah pendidikan bagi warga bangsa menjadi keharusan, dan negara perlu untuk memberikan hak pendidikan bermutu bagi siapapun tanpa terkecuali.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Pendidikan yang Berkeadilan Sosial.
 - a) Terbukanya akses pendidikan bagi masyarakat dengan segala keterbatasannya, baik fisik, mental, sosial, emosional, ekonomi, maupun kultural, untuk mendapat kesamaan dalam mengakses layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan.
 - b) Pemerintah harus mengadakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan daerah, perlu diadakan atau difasilitasi sarpras pendidikan yang berlandaskan atas kebutuhan yang mendesak, jangan asal membangun namun akhirnya tidak terpakai, perlu adanya fasilitas-fasilitas pendukung lainnya,
2. Pentingnya Pendidikan berkeadilan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 - a) pendidikan gratis yang dicanangkan dan menjadi amanat konstitusi itu perlu formulasi yang tepat agar tepat sasaran sesuai yang membutuhkan, karna masih banyak kejadian terjadi kesalahan dalam pengelolaan sehingga antara yang kaya dan miskin sama-sama merasakan pendidikan gratis,

padahal tidak semestinya itu terjadi, pendidikan gratis layak nya diperuntukan bagi mereka yang membutuhkan.

B. Saran / Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil penelitian, peneliti memberikan saran dan rekomendasi, sebagai berikut:

- a) Demi tegaknya keadilan sosial atas pendidikan, kepastian pendidikan pada mereka yang berada di daerah timur Indonesia. Maka harapannya pemerintah dalam hal ini harus lebih memberikan konsentrasi lebih pada pendidikan yang masih terbilang kurang, baik itu mutu pendidikannya, fasilitas dan termasuk sumberdaya manusiannya.
- b) Perlunya control dan pengawasan yang ketat atas pelaksanaan pelayanan pendidikan yang massif dan terencana di daerah-daerah 3T.

DAFTAR PUSTAKA

Ada tujuh macam pendekatan dalam penelitian hukum, sebagaimana yang dikemukakan Johnny Ibrahim: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*); (3) Pendekatan analisis — (*analytical approach*); (4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (5) Pendekatan historis (*historical approach*); (6) Pendekatan filsafat (*philosophical approach*); dan (7) Pendekatan kasus (*case approach*).

Budiono Kusumahamidjojo. Teori Hukum, dilema antara hukum dan kekuasaan (Bandung: Yrama Widya, 2016)

Kemertian Pendidikan Nasional, (2003), Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

- Fajlurrahman Jurdi. Teori Negara Hukum (Malang: Setara Press, 2016)*
- Ilham Cendikia & Markus. Laporan Alternatif Hak EKOSOB: Pendidikan, Kesehatan, dan Pangan. (Pattiro: Jakarta, 2011)
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 92.
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019)
- Kaelan. M.S, *Negara Kebangsaan Pancasila, Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. (Yogyakarta: Paradigma, 2013)
- Loresta nusantara & Akbar Najamudin. *Mendidik dari Akar Rumput* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019)
- Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: Erlangga, 2001),
- Nurcholish, (1992), *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Mukhrizal Arif, dkk. *Pendidikan pos modernism, telaah kritis pemikiran tokoh pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Poejawijatna dalam Mohammad Nursyam, *Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum. Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional*. Disertasi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1998)
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002),

WEBSITE

- Bahder Johan Nasution. Kajian Filosofis tentang Hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern. Diakses pada tgl 23 juni 2019.
- Deni galus <https://www.indonesiana.id/read/110634/pelaksanaan-pendidikan-yang-adil-dan-merata-di-indonesia#A6G180xcYZUo7Jsr.99> diakses pada tanggal 25 juni 2019.
- Emmanuel Sujatmoko <https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendidikan.pdf>, diakses pada tanggal 2 juli 2019

Fadhila. *Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan.*

<http://www.neraca.co.id/article/118262/sistem-zonasi-ppdb-melanggar-konstitusi>, diakses pada tgl 25 september 2019.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=95011&val=1230>, diakses pada tanggal 27 Oktober, jam 19.30

<http://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106> diakses tanggal 19 Oktober 2018

<https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/51206/mahasiswa-minta-penerapan-ukt-lebih-akurat>, diakses tgl 27 september 2019

Mahmud_Yunus <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2015/02/15-pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html#>, diakses pada tgl 2 juli 2019

Muhammad. <https://www.kompasiana.com/muhammadibnu5874/5b54d8ddd1962e32b47d3629/pendidikan-dan-hak-asasi-manusia?page=all>, diakses tgl 4 juli 2019

Ricky..M. <https://www.kompasiana.com/malber/550b6a66813311c615b1e4b4/pendidikan-berkeadilan-untuk-masa-depan-bangsa-indonesia>.diakses tgl 4 juli 2019

